

BAB II

DINAMIKA KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Laut China selatan merupakan Laut bebas yang menghubungkan jalur lintas perairan Internasional antar negara seperti negara-negara Eropa hingga Asia. Dengan posisi Laut China Selata yang strategis membuat negara-negara kuat Seperti China ingin mengambil alih kekuasaan atas Laut China Selatan. Laut China Selatan yang telah penulis bahas di latar belakang pada Bab 1 bahwasannya Laut China Selatan memiliki sumber daya alam berupa gas yang banyak, dengan ini menambahkan negara-negara besar ingin menduduki kekuasaan atas Laut China Selatan.

Dalam konflik Laut China Selatan banyak terjadi ketegangan antar negara-negara Asia Tenggara yang terseret didalam masalah ini, selain ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan yang saling klaim antar negara yang bersengketa yang hingga sampai sekarang belum bisa di hentikan. Sekarang beberapa perkembangan konflik Laut China Selatan yang bisa dikatakan belum mendapatkan titik terang yaitu dimana hubungan antar negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filiphina dengan Republik Rakyat China.

Seperti Filiphina telah mengemukakan beberapa laporan tentang pelanggaran yang telah di lakukan oleh kapal-kapal China yang selama ini disengketakan di Laut China Selatan, tak luput pula terjadinya beberapa insiden antara kapal patroli China dengan beberapa kapal-kapal nelayan yang berasal dari negara Filiphina. Kemudian Republik Rakyat China telah dituduh melakukan pemasangan instalasi baru di beberapa titik di wilayah yang disengketakan dan juga China melakukan pengintimidasian terhadap beberapa kapal-kapal yang mengeksplorasi minyak Filiphina.

Sementara itu Vietnam sudah melakukan beberapa kali pertemuan secara bilateral dengan pemerintah Republik Rakyat China guna membicarakan perbedaan antar dua negara yaitu Vietnam dengan China mengenai Laut China Selatan. Akan tetapi, pertemuan bilateral

yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam terhadap pemerintah China seakan seperti tidak bermanfaat. Karena China yang semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang telah dilakukan oleh kapal-kapal China di daerah perairan negara Vietnam. China juga melakukan pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak milik negara Vietnam yang menambahkan suasana antar dua negara yaitu Vietnam dan Republik Rakyat China semakin keruh dan membuat negara Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya yang ada di Laut China Selatan.

China sebagai negara yang berambisi akan kekuatan negara, karena China akan melakukan segala cara untuk mendukung peningkatan kekuatan negaranya. Sebagai negara yang sangat powerfull, China akan berperilaku sesuai kepentingan Nasional yang dimilikinya dan Laut China Selatan dijadikan sebagai objek yang terkodiner untuk dijadikan tempat untuk meningkatkan kekuatan negara dan meningkatkan posisi organing di dalam sistem pemerintahan negara yang anarki.

Dengan sifat negara yang Powerfull, Republik Rakyat China juga merupakan negara yang mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan yang sekarang bersikap keras dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan dan juga China sekarang cenderung untuk menolak akomodatif dalam sengketa Laut China Selatan. Karena China juga memiliki pandangan terhadap laut China Selatan, bahwasannya Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang terbentang dari Selat Malaka dan Singapura di barat daya ke Selat Taiwan di timur laut. Laut China Selatan juga termasuk ke dalam kategori laut bebas dan juga Laut China Selatan dalam tatanan kelautan internasional merupakan kawasan yang sangat ekonomis, politis dan strategis.

China juga melihat bahwasannya Laut China Selatan sebagai jalur perhubungan dari Eropa dengan Asia terlebih lagi China yang merupakan negara yang memiliki peningkatan ekonomi yang bertumbuh sangat pesat menjadikan China ingin memiliki Laut China Selatan

dimana negara-negara sekitar China menjadikan perikanan sebagai sumber besar negara-negara tersebut (Redaktur, 2016).

Dalam pembahasan Bab ini penulis memiliki pandangan bahwasannya China memiliki kepentingan yang tepat dan padat atas kepentingan China didasarkan dalam 3 pokok penting yaitu ekonomi, politik serta kebutuhan pertahanan dan keamanan negara bagi China.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Laut China Selatan seperti memiliki hasil Minyak bumi yang berlimpah dan dengan kekayaan minyak yang dimiliki oleh Laut China Selatan dan China yang memiliki prospek kedepan dimana penduduk China yang memiliki pertumbuhan yang cepat karena pada kisaran tahun 1970-an China sempat mengalami kemerosotan tentang kebutuhan minyak negara dan juga mempengaruhi perekonomian China, sehingga dengan pengalaman turunnya persediaan minyak China pun memulai untuk gencar dalam meningkatkan persediaan minyak untuk memenuhi pemanfaatan pertumbuhan penduduk di negara China. dengan ini China memanfaatkan minyak di Laut China Selatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

A. Kepentingan Nasional Republik Rakyat China terhadap Laut China Selatan

Dengan melihat sikap China yang terbilang agresif dalam permasalahan sengketa di Laut China Selatan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara, penulis mampu melihat bahwasannya ini ada kepentingan nasional yang dimiliki oleh Republik Rakyat China. Dimana dalam pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu di jurusan Hubungan Internasional, bahwasannya untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara harus memenuhi kebutuhannya dengan memenuhi kepentingan nasional. Dengan pencapaian yang didapatkan melalui kepentingan Nasional Negara tersebut maka kehidupan Negara secara otomatis akan berlangsung stabil, baik dari segi politik, dari segi ekonomi hingga dari segi sosial dan pertahanan keamanan yang dimiliki oleh negara itu juga membaik.

Kepentingan Nasional (Nastional Interest) merupakan salah satu faktor pendukung pembuat kebijakan politik luar negeri suatu Negara.

Kepentingan Nastional Republik Rakyat China terhadap Laut China Selatan, dengan melakukan pengklaiman yang mengataskan kepemilikan kawasan Laut China Selatan adalah daerah teritorial Republik Rakyat China sejak 1970-an dan didasari oleh kepentingan ekonomi, kepentingan politik serta kemajuan akan pertahanan keamanan negaranya.

China sempat mengalami penurunan produksi minyak akibat pertumbuhan penduduk yang terbilang cepat, dalam mengembalikan pemulihan kebutuhan pemanfaatan minyak oleh penduduk di China membuat China lebih meningkatkan impor minyak dan gas demi menutupi kekurangan bahan mineral yang sedang di alami oleh China. Dalam meningkatnya impor minyak dan gas oleh China, China juga mengurangi impor perminyakan dan Gas.

Terdapat Faktor eksternal yaitu minyak dunia juga mengalami pemerosotan yang membuat China tambah mengalami penurunan untuk bahan minyak dan hal itu juga tal luput mampu mempengaruhi perekonomian Republik Rakyat China pada saat itu.

Dalam mengurangi impor minyak yang berlebihan, pada tahun 1970-an Republik Rakyat China mengalami penurunan produksi minyak China mulai melihat bahwasannya di Laut China Selatan adalah sebagai tempat pemanfaatan minyak dan gas dalam jangka panjang diamana yang kita ketahui di Laut China Selatan terdapat ladang minyak dan gas yang terbilang banyak dan juga termasuk jalur perdagangan. Dalam klaiman ini juga termasuk kedalam aspek politik dimana aspek tersebut berkaitan dengan politik luar negeri China terhadap negara-negara yang berada pada Asia Tenggara (Latief, 2013).

Adapun dua faktor pendorong kepentingan Republik Rakyat China dalam klaim di Laut China Selatan selain dari pemerosotan produksi minyak China:

- 1) China pernah mengalami kelemahan dalam menangani wilayah di daerah tepian Laut yang menyebabkan mempermudah peluang penetrasi imperialisme Barat yang

berakibat pada wilayah Republik Rakyat China yang menjadi terbagi-terbagi dalam kekuatan penguasaan asing (Latief, 2013).

- 2) Faktor kedua yang juga berkaitan dengan kepentingan keamanan China, dimana Republik Rakyat China membutuhkan pangkalan militer laut yang strategis serta peningkatan armada laut China yang besar. Dengan sikap agresif China dalam mempertahankan klaimnya terhadap kawasan Laut China Selatan juga ada kaitannya dengan Republik Rakyat China dalam memperoleh pengakuan dunia bahwa Republik Rakyat China sebagai kekuatan maritim yang handal bukan cuma di kawasan Asia timur dan Asia Tenggara tetapi juga di dunia Internasional (Latief, 2013).

Dalam konflik sengketa Laut China Selatan yang melibatkan Republik Rakyat China dan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, China seakan menampakkan kekuatan negaranya untuk mempertahankan sengketa Laut China Selatan. Dengan kekuatan negara yang terbilang besar China mampu melawan negara-negara kawasan Asia Tenggara.

B. Tindakan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan

Adapun contoh negara-negara yang melakukan perlawanan terhadap yang di lakukan oleh Republik Rakyat China dalam mengklaim wilayah-wilayah yang ada di Laut China Selatan:

1. Filipina

Filipina adalah salah satu negara yang menolak klaim sepihak Beijing atas Laut China Selatan, jalur laut tersibuk di dunia. Beberapa negara Asia Tenggara juga memiliki klaim serupa dan perselisihan ini memicu kekhawatiran menimbulkan konfrontasi militer yang bisa mengganggu perdagangan global (Berlianto, 2016). Filipina telah membawa permasalahan sengketa Laut China Selatan dengan Republik Rakyat China ke pengadilan tinggi

internasional Arbitrase di Deen Haag, Belanda. Pasaunya, Filipina ingin menyelesaikan sengketa tersebut dengan cepat agar tidak ada lagi permasalahan sengketa di Laut China Selatan. Melalui berita Kompas.com bahwa pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, Selasa (12/7/2016), memutuskan, China telah melanggar kedaulatan Filipina di LautChina Selatan. Putusan tersebut berisi “ China telah melanggar kedaulatan negara Filipina. Karena China telah melakukan penangkapan ikan, membangun pulau buatan, eksplorasi minyak dan tidak melarang nelayan China melakukan di zona tersebut. tindakan tersebut terjadi di Zona Ekonomi Eksklusifnya Filipina” (Hardoko, 2016)

Filipina sebelumnya membawa permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan tinggi Internasional. Filipina telah menentang apa yang telah di sebutkan oleh China yaitu dengan sebutan “*nine dash line*” dimana seluruh perairan Laut China Selatan adalah kepemilikan Republik Rakyat China. Permasalahan sengketa antara Filipina dengan Republik Rakyat China berfokus kepada masalah perairan, karena perairan memiliki kekayaan ikan yang melimpah, memiliki cadangan gas alam serta menjadi jalur perdagangan Internasional yang memiliki kekayaan mencapai 5 triliun dollar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pemerintah Filipina juga meminta pengadilan arbitrase untuk memperjelas gugusan karang atau kepulauan di perairan itu yang masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (Hardoko, 2016).

2. Vietnam

China telah melakukan pengeboran minyak di perairan kepulauan paracel dimana daerah ini yang menjadikan dua negara, Vietnam dan Republik Rakyat China dalam permasalahan sengketa di Laut China Selatan. Langkah pengeboran minyak yang telah di lakukan China membuat negara Vietnam seakan tidak terima dengan tindakan tersebut. Menteri luar negeri Vietnam Pham Binh Minh yang menghubungi penasehat pemerintahan Republik Rakyat China Yang Jiechi yaitu:

“pengeboran minyak di wilayah itu ilegal dan melanggar kedaulatan negara mereka. Apalagi, kata Pham, pengeboran senilai US\$1 miliar itu dikawal oleh kapal-kapal perang Tiongkok. Vietnam tidak bisa menerimanya dan memprotes tindakan Tiongkok. Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan pengeboran minyak dan memulangkan kapal-kapal dari wilayah itu” kata Minh kepada Yang (Armandhanu, 2014).

Pengeboran yang dilakukan di kepulauan Paracel ini diklaim oleh Republik Rakyat China bahwa kepulauan paracel adalah milik mereka dan telah di kuasai kurang lebih selama 40 tahun tetapi Vietnam juga menyatakan bahwa kepulauan Paracel adalah milik mereka. Permasalahan sengketa tersebut mengalami peperangan yang memakan korban tentara Vietnam sebanyak 74 orang dan pertempuran terjadi lagi pada 1988 yaitu yang menewaskan pelaut Vietnam sebanyak 64 orang dalam merebut kepulauan Spartyly.

Pengeboran minyak yang telah dilakukan oleh Republik Rakyat China yang telah dilakukan didalam Zona Ekonomi Eksklusif negara Vietnam yang telah di atur pada tahun 1982 melalui Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS) yang memiliki aturan bahwa kapal perang Tiongkok dilarang berada di radius 4,8 kilometer dari wilayah tersebut (Armandhanu, 2014).

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Republik Rakyat China dalam merebut daerah kekuasaan di Laut China Selatan:

- 1945 - 1979

1945, Angkatan bersenjata Republik Rakyat China di nanjing telah menerima penyerahan yang telah dilakukan oleh Garnisun Jepang di salah satu Kota yang terletak di China yaitu Taiwan. Penyerahan yang dilakukan oleh garnisun Jepang juga termasuk Kepulauan Paracel dan Spartyly. Sebab Jepang pada tahun 1927 mengklaim kepulauan Spartyly dan Paracel sebagai daerah mereka dan

tahun 1939 Jepang mulai menduduki kepulauan tersebut dan mendirikan Pangkalan Militer dan pada saat itu Jepang mengambil Alih kendali Laut China Selatan. Namun sekarang kedua pulau tersebut telah dikembalikan kepada Republik Rakyat China dengan deklarasi Kairo dan Potsdam yang juga atas bantuan Amerika.

- **1950**, China menarik garnisun mereka yang ada di kepulauan Paracel dan Spartly ke Taiwan, karena para nasionalis China yang ada di kepulauan tersebut telah di usir oleh Tentara pembebasan (PLA).
- **1954**, China menandatangani the Geneva Accords sebagai berakhirnya perang Indochina. Pembagian yang dilakukan oleh Indochina Prancis menjadi 3 yaitu Laos, Khamboja dan Vietnam. Namun disini pembagian terhadap negara Vietnam yang mewarisi wilayah Prancis Indochina yang juga termasuk kepulauan Spartly dan Paracel (1933) sebagai daerah perbatasan selatan Negara Vietnam.
- **1974**, di tahun ini Vietnam yang berusaha untuk membangun klaim kedaulatan negara mereka yang terletak kepulauan Spartly dengan bentuk mendirikan pemukiman di sana, hingga mengusir nelayan-nelayan China yang berada di kepulauan Paracel barat daya. Pada tahun ini juga China dan Vietnam terlibat pertempuran laut yang terjadi di Shanhu Island, dimana China mampu mengalahkan Vietnam dan China berhasil memperluas kontrol mereka diseluruh kepulauan Paracel.
- **1975**, Vietnam menyesali kesepakatan mereka dengan China 1956. Dengan ini pemerintahan Vietnam yang bersifat komunis mengambil alih atas Kepulauan Spartly dan Paracel.

- **1979**, Pemerintah Vietnam mengadopsi posisi Vietnam Selatan dan mengklaim kedaulatan atas semua kepulauan di Laut China Selatan.
- 2002 - 2016
 - **2002**, China dengan ASEAN menandatangani kesepakatan kode etik di Laut China Selatan
 - **2005**, kapal China menembaki kapal nelayan Vietnam dari provinsi Thanh hoa yang menewaskan 9 orang nelayan Vietnam yang berada di dalam kapal tersebut dan China juga menahan satu kapal yang berisi 8 orang di pulau Hainan. Dengan melalui menteri luar negeri China mengklaim bahwasannya itu adalah bajak laut.
 - **2012**, Kapal perang Filipina terlibat ketegangan dengan kedua kapal pengintai China. Ketegangan kapal kedua negara tersebut terjadi di Scarborough shoal. Di mana daerah tersebut adalah daerah yang diklaim oleh kedua negara tersebut
 - **April 2012** Filipina dengan Amerika Serikat melakukan latihan tahunan di palawan, Filipina. Masih pada bulan dan tahun yang sama, China mengusir para kapal arkeolog Filipina yang berada di perairan Scarborough Shoal, karena China mengklaim bahwasannya daerah tersebut masuk kedalam daerah integralnya.
 - **Mei 2012**, di bulan Mei ini pemerintah China mengeluarkan larangan memancing di Scarborough Shoal, terkhususnya untuk Filipina. Sehingga pada pertengahan Juni 2012 Filipina menjadi efektif karena kedua negara tersebut telah menarik kembali kapal mereka yang ada di sekitar Shoal yang disengketakan.
 - **2013**, China melakukan latihan militer di Shoal. Akan tetapi Malaysia tidak menaruh keprihatinan kepada China. Bahkan Malaysia menyarankan untuk

bekerja sama dengan China di Laut China Selatan dan mengabaikan pengklaiman yang lain. Karena yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein bahwasannya Malaysia tidak mempunyai masalah dengan China yang berpatroli di Laut China Selatan.

- **2014**, ditahun ini China memberikan Izin memancing secara legal yang membuat Amerika, Filipina dan Vietnam merasa keberatan dengan hal tersebut. pada tahun ini pula Filipina mengirimkan kasus dipengadilan Arbitrase di Den Haag untuk melawan China. Pada tahun 2014 ini juga terjadi insiden dimana kapal angkatan laut Vietnam bertabrakan dengan kapal China di Laut China Selatan. Asalan insiden tersebut terjadi karen China telah mendirikan Rig Minyak di daerah dimana kedua negara ini Vitenam dan China bersengketa.
- **2015**, pengajuan kasus yang dilakukan oleh Filipina untuk pengadilan Arbitrase di Den Haag yaitu untuk membatalkan klaim China yang dilakukan di daerah teritorial Filipina. Sehingga pada tahun yang sama pengadilan Arbitrase mengabulkan 7 dari 15 pengajuan yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina. Terkhusus nya daerah Shoal dan air pasang surut yang ada di Michief Reef apakah pantas untuk dianggap pulau. Pada bulan November di tahun 2015 Indonesia juga mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menuntut China atas kepulauan Natuna yang di klaim oleh China.
- **2016** pada bulan Januari pemerintah Republik Rakyat China melakukan penuntutan terhadap Negara Korea Selatan untuk menyerahkan bagian besar di wilayah Laut kuning yang juga termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif yang meliputi beberapa Laut, seperti Laut Mount Host yang merupakan daerah tempat pusat penelitian.

- **Maret 2016** Indonesia membawa para nelayan-nelayan China yang mengambil ikan secara ilegal di Natuna ke Indonesia yang kemudian kapal kementerian KKP di halau oleh Kapal Coast Guard guna melakukan pembebasan nelayan-nelayan China. Pada bulan Mei juru bicara pemerintah Republik Rakyat China, Hua Chunying, mengatakan bahwa sebanyak 40 negara mendukung sikap mereka disengketakan Laut China Selatan. Pada bulan dan tahun yang sama, Jend. Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwasannya Indonesia masih mempertimbangkan persoalan patroli bersama dengan Malaysia dan Filipina di Laut China Selatan.
- **Mei 2016** Pemerintah China ingin membangun Biro di kepulauan Spratly guna membantu para nelayan-nelayan dari China apabila mengalami kesulitan dan juga agar memperpendek jarak mereka untuk melakukan perjalanan (Arihito, 2017).

Dari sekian penjabaran di atas yang mengenai tindakan-tindakan negara Asia Tenggara yang wilayah teritorial mereka yang ada di kawasan Laut China Selatan untuk mempertahankannya dari klaim China dan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat China terhadap kawasan-kawasan yang mereka anggap sebagai daerah yang masuk teritorial negaranya yang berada di daerah Laut China Selatan kita mengetahui telah banyak yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara yang terkait klaim China tersebut dan berbagai macam cara yang dilakukan agar daerah-daerah teritorial negara Asia Tenggara yang ada di Laut China Selatan tetap terjaga dan tetap masuk kedalam daerah teritorial negara-negara Asia Tenggara. Serta tak luput pula perlawanan dari negara yang mengklaim daerah teritorial Asia Tenggara yaitu Republik Rakyat China. Perlawanan yang telah dilakukan oleh China bukan lah hanya sekedar perlawanan biasa, melainkan

perlawanan yang bisa dikatakan keras. Karena China tak takut akan terjadinya peperangan dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat.

Dengan tindakan-tindakan yang terjadi, Republik Rakyat China dalam mempertahankan klaim atas Laut China selatan memiliki alasan berupa historis, dimana para pendahulu China telah dulu menduduki kawasan-kawasan di Laut China Selatan.

C. Alasan Laut China Selatan dianggap sebagai daerah teritorial China

China beranggapan bahwasannya Laut China Selatan merupakan masuk kedalam kedaulatan negaranya. Karena menurut sejarah kuno yang berkembang di negara China bahwa Laut China Selatan adalah murni milik kedaulatan China, karena pulau-pulau yang ada di daerah Laut China selatan telah di temukan terdahulu oleh dinasti-dinasti pendahulu China, seperti:

- Dinasti Han sejak abad ke 2 sebelum masehi yang menemukan pulau-pulau yang ada di Laut China Selatan.
- Pada abad ke-3 sebelum masehi
Penduduk China mengklaim Laut China Selatan adalah miliknya karena dengan argumen pada 200 sebelum masehi para nelayan China menggunakan pulau spartly sebagai tempat untuk mencari ikan. Dengan Dua buku Cina yang terkenal ditulis oleh Wan Zhen dari Provinsi Wu bagian Timur dipublikasikan selama periode Tiga Kerajaan (220-280 AD) dan karya berjudul Guangzhou Ji (Chronicles of Guangzhou) ditulis oleh Pei Yuan dari Dinasti Jin menggambarkan Pulau Paracel dan Spratly. Pada dinasti Jin, pemerintah lokal mengirimkan angkatan laut untuk melakukan patroli di daerah sekitar wilayah laut tersebut (Arihito, 2017).
- Dinasti Yuan pada abad ke 12 sebelum masehi
Telah memasukkan Laut China Selatan ke dalam daerah teritorialnya China.

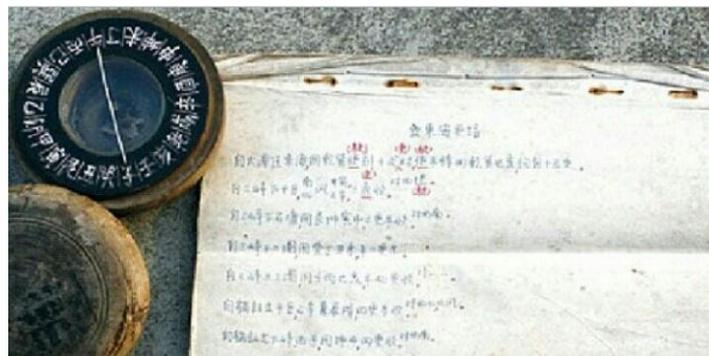
Dengan 3 point tersebut kita melihat bahwa pemerintah Republik Rakyat China berpegang pada masa dinasti-dinasti pendahulu mereka, dimana para pendahulu mereka telah menduduki dahulu daerah-daerah yang berada di Laut China Selatan.

China juga mengemukakan bahwa kepulauan Sparty yang memiliki jarak dengan pelabuhan Yu Lin (Pulau Hainan) yang berjarak sekitar 1.100Km. pelabuhan Yu Lin yang ada di Pulau Hainan yang termasuk ke dalam kepulauan Nansha dan kepulauan Parcel terletak sebelah utara pulau Sparty yang memiliki jarak 277,8km dari pulau Hainan sebagai bagian dari pulau Xisha bagian dari provinsi Hainan (Arihito, 2017).

Gambar 2.1 Pulau Sparty dan Parcel (Arihito, 2017)



Gambar 2.2 Bentuk Buku Kuno berusia 600 tahun yang jadi dalih China sebagai pemilik (Arihito, 2017)



Dengan buku kuno yang berusia 600 tahun yang bertuliskan tangan ini lah yang di temukan oleh China yang membuat China memperkuat argumen atau klaimnya akan kepemilikan hampir keseluruhan Laut China Selatan. Buku yang kenal dengan nama *Genglubu* ini lah sebagai petunjuk navigasi tradisional kepada nelayan-nelayan China pada waktu berlayar menuju Laut China Selatan dan juga sebagai petunjuk untuk menuju ke pulau

Spartly di Laut China Selatan yang diklaim oleh China yang diberi nama kepulauan Nansha dan Huangyan.

Buku yang diberi nama *Genglubu* dimiliki oleh seorang pensiunan yang berusia kisaran 81 tahun yang bernama Su Chengfen yang mengatakan kepada media di China bahwasanya dia mendapatkan buku tersebut melalui ayahnya dan ayahnya memperoleh buku tersebut dari kakeknya terdahulu dan Su Chengfen mendapatkan buku tersebut ketika beliau berumur 23 tahun ketika itu beliau menjadi Kapten kapal (Arihito, 2017).

Dengan alasan-alasan sejarah yang dimiliki oleh China, membuat China semakin berani untuk menduduki kawasan-kawasan di Laut China Selatan. Dengan bukti sejarah menurut Republik Rakyat China yang bahwa para pendahulu mereka yang menduduki kawasan Laut China Selatan membuat mereka semakin berani untuk melawan negara-negara Asia Tenggara. Republik Rakyat China pada akhirnya membuat keputusan sendiri untuk kawasan Laut China Selatan dengan membuat garis pada peta negara mereka. Garis tersebut terletak di bagian kawasan Laut China Selatan yang sekarang disebut sebagai Nine Dash Line (setelah berubah dari Eleven dash Line).

Selain itu strategi Republik Rakyat China dalam sengketa Laut China Selatan merupakan cara yang sama dalam usaha mempertahankan integritas teritorialnya. Tidak hanya kepentingan yang dimiliki Republik Rakyat China terhadap kepulauan Paracel dan kepulauan Spartly untuk menunjang kepentingan modernisasi tetapi juga kepentingan Republik Rakyat China juga ingin menyatukan Taiwan. Apabila Republik Rakyat China mampu mengontrol jalur lintas perairan yang terdapat pada Laut China Selatan, maka negara ini mampu mempertahankan integritas teritorial Taiwan.

D. Republik Rakyat China dengan Nine Dash Line di Laut China Selatan

Setelah perang dunia II yang membuat Jepang kalah, Republik Rakyat China langsung mereklamasikan kepulauan Paracel, Spartly dan Pratas setelah mereka menerima penyerahan

yang dilakukan oleh Jepang melalui deklarasi oleh kairo dan potsdam. Setelah hal itu terjadi China langsung mengirimkan kapal-kapal menuju pulau-pulau tersebut guna menguasainya setelah Jepang tertunduk pada perang dunia II. Sebelum adanya sembilan garis putus tersebut, China membuat sebelas garis putus yaitu pertama kali ditampilkan pada peta yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Cina (1912-1949) bulan Desember 1947 untuk menjelaskan atas pengklaiman di Laut Cina Selatan (Brown, 2009).

Setelah Partai Komunis Cina mengambil alih Cina daratan dan membentuk Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, jalur ini diipertinjau ulang dan mengalami revisi untuk dijadikan sembilan, pertinjauan garis tersebut didukung oleh Zhou Enlai (Brown, 2009). Setelah terjadinya evaluasi persoalan garis ini selesai dan telah ditetapkan bahwsannya garis putus yang tadinya ada sebelas garis putus diganti menjadi sembilan garis putus dan juga China menetapkan dengan sembilan garis putus ini mengklaim perairan Laut Cina Selatan khususnya kepulauan Sparty dan kepulauan Paracel.

Pada masa pemerintahan China yang dipimpin oleh partai Kuomintang pada saat itu dipimpin oleh Chiang Kai Sek, yang sudah menetapkan klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan pada Saat itu, pemerintahan Kuomintang menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai "eleven-dash line" dan sekarang menjadi *nine dash line*. Atas klaim ini, China mampu menguasai hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk juga Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel yang mereka peroleh dari Jepang setelah Jepang mengalami kekalahan besar pada saat perang dunia II.

Namun, pengklaiman yang dilakukan oleh China tersebut dengan *nine dash line* terjadi kesinggungan dengan kawasan negara tetangganya. Tak terelakan lagi bagi negara-negara seperti Filipina, Malaysia, Brunei Darusalam, Vietnam dan Taiwan yang merebutnya dari Republik Rakyat China. Kemudian pada tahun 1974 dengan berakhirnya keterlibatan Amerika pada Vietnam dengan perjanjian damai Paris, Republik Rakyat China langsung

mengambil alih dan mengamankan kepulauan tersebut dengan cara China mengirimkan beberapa pasukan militernya untuk kepulauan Paracel dan mengibarkan bendera China untuk menandakan bahwa ini daerah teritorialnya. Republik Rakyat China mengalahkan satu garnisun pasukan Vietnam di sana (Ervan, 2016). Setelah dikalahkan oleh pasukan militer China, Pemerintah Vietnam akhirnya mendirikan pos permanen dan menduduki kepulauan Spartly secara permanen dan pada saat yang sama pula China memperkuat kekuatan militernya di pulau Woody yaitu sebagai pulau terbesar yang ada di kepulauan Paracel (Ervan, 2016).

Setelah bersatunya negara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara dan mereka menjadi Republik sosialis Vietnam dengan tetap mengukuhkan bahwasannya kepulauan Spartly dan Paracel sehingga Vietnam mengklaim China bahwasannya China tak pernah mengklaim kepemilikan kepulauan Spartly dan Paracels sebelum tahun 1940-an (Ervan, 2016).

Dalam penyelesaian sengketa Laut China Selatan, Republik Rakyat China ingin melakukan negosiasi yang bersifat bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam permasalahan sengketa. Tetapi, negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam permasalahan sengketa menolak dengan adanya negosiasi bilateral karena China adalah negara yang besar dan pengaruhnya yang besar dengan begitu negara-negara Asia Tenggara yang terlibat menganggap ini akan menguntungkan negara China dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Beberapa negara Asia Tenggara yang terlibat dalam masalah sengketa ini mengusulkan bahwasannya Republik Rakyat China harus melakukan perundingan dengan ASEAN guna mempertinjau permasalahan sengketa, tetapi China malah menolak dikarenakan negara-negara ASEAN masih terbelah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa.